TRIWULAN III 2023

LAPORAN KINERJA

PANGKALAN PSDKP BITUNG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2023. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) TW III Tahun 2023 merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

`Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada triwulan III tahun 2023. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian kinerja ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan disampaikan kepada pimpinan.

Bitung, 17 Oktober 2023
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG DITJEN PSDKP

Rumiawan, S.T, M.Si
NIP. 19750930 200112 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) TW III tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2023 pada Pangkalan PSDKP Bitung terdapat 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja. Hasil pengukuran pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) pada Triwulan III Tahun 2023 adalah 110,95 % dari 24 Indikator Kinerja yang dimiliki oleh Pangkalan PSDKP Bitung, 11 (sebelas) Indikator Kinerja telah dilakukan pengukuran pada Triwulan III tahun 2023.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2023 dilaksanakan melalui 5 (lima) Kegiatan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan (2350), Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353), dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2355). Pagu alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2023 sebesar Rp48.147.530.000 dengan realisasi anggaran pada Triwulan III tahun 2023 Rp28.350.377.020 atau 58,88%. Pada tahun 2023 ada beberapa kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung yang dilaksanakan untuk medukung Program Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu pada kegiatan Operasi Armada Kapal Pengawas dan Speed Boat serta kegiatan Pengawasan perizinan berusaha berbasi risiko bidang kelautan dan perikanan, pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1
1.3. ISU STRATEGIS 1
1.4. TUGAS DAN FUNGSI 2
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN 5
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA **6**
2.1. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP 2020-2024 6
2.2. RENCANA KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG TAHUN 2023 7
2.3. PERJANJIAN KINERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG TAHUN 2023 9
2.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TW III TAHUN 2023 11
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA **12**
3.1. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023 12
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 14
3.3. AKUNTABILITAS ANGGARAN 28
BAB 4 PENUTUP **30**
4.1. KESIMPULAN 30
4.2. REKOMENDASI 30
LAMPIRAN **31**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2023..... 9
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Triwluan III Tahun 2023 12
Tabel 3. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas TW III Tahun 2023..... 15
Tabel 4. Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW III Tahun 2023..... 16
Tabel 5. Rincian realisasi capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung s.d. TW III Tahun 2023..... 18
Tabel 6. Rekapitulasi pemeriksaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung s.d. Triwulan III Tahun 2023 23
Tabel 7. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO TW III tahun 2023 .. 26
Tabel 8. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI TW I tahun 2023 . 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung 4
Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung 4
Gambar 3. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 12

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) TW III tahun 2023 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan *"good governance".*

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) TW III tahun 2023 ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada TW III tahun 2023 kepada para stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari capaian kinerja tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasinya.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis bidang perikanan tangkap, meliputi
   a. Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi.

b. Isu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KI), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (bius dan bom ikan), penggunaan ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan lain sebagainya.

2. Isu strategis bidang perikanan budidaya, meliputi:
   a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
   b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
   c. Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan.
3. Isu strategis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
   a. Pelaksanaan ekspor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional.
   b. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
4. Isu strategis bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
   a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom.
   b. Dokumen perizinan PKKPRL.
   c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut. Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Satwas dan Wilker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP di tahun 2023.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta

pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

b. pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
c. pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
d. pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
e. pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
f. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a. Kepala Pangkalan

   Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Umum

   Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung

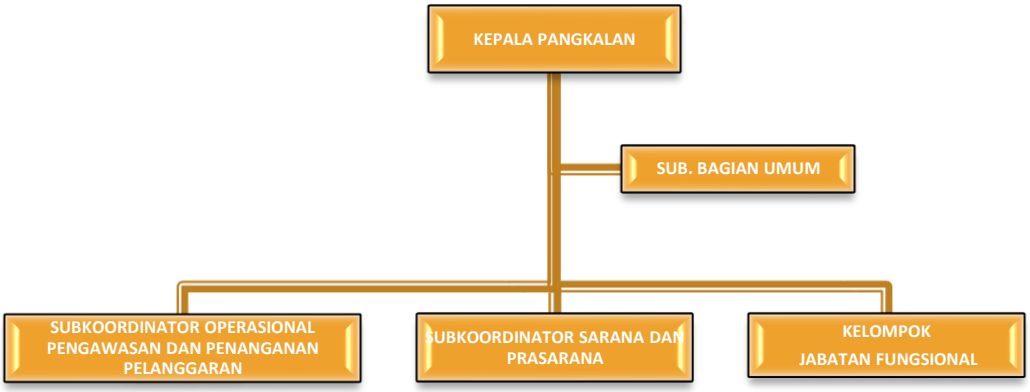

Kepala Pangkalan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PSDKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di lingkungan UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Satuan Pengawasan SDKP Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing.

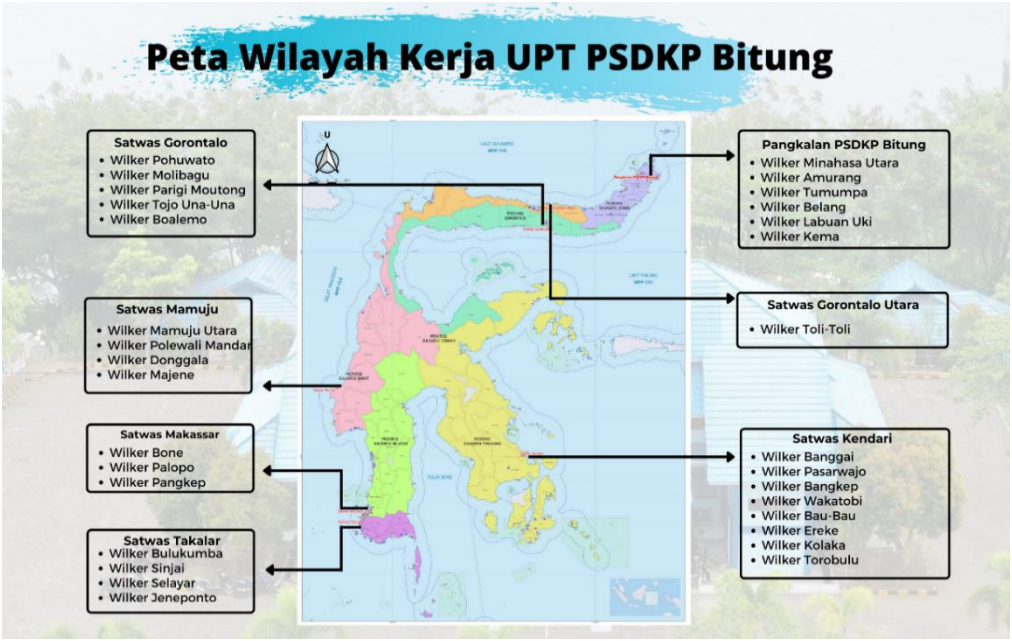

Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung

Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 (enam) Satuan Pengawasan SDKP 31 (tiga puluh satu) Wilayah Kerja PSDKP, dengan rincian:

a. **Pangkalan PSDKP Bitung**, meliputi: Wilker PSDKP Amurang, Wilker PSDKP Belang, Wilker PSDKP Labuan Uki, Wilker PSDKP Kema, Wilker PSDKP Tumumpa, dan Wilker PSDKP Sitaro.
b. **Satwas SDKP Gorontalo**, meliputi: Wilker PSDKP Molibago, Wilker PSDKP Parigi Moutong, Wilker PSDKP Tojo Una-una, Wilker PSDKP Boalemo, dan Wilker PSDKP Pohuwato.
c. **Satwas SDKP Kendari**, meliputi: Wilker PSDKP Banggai, Wilker PSDKP Banggai Kep. Dan Banggai Laut, Wilker PSDKP Bau-bau, Wilker PSDKP Ereke, Wilker PSDKP Kolaka, Wilker PSDKP Pasar Wajo, Wilker PSDKP Torobulu, dan Wilker PSDKP Wakatobi.
d. **Satwas SDKP Gorontalo Utara**, meliputi: Wilker PSDKP Toli-toli.
e. **Satwas SDKP Makassar**, meliputi: Wilker PSDKP Bone, Wilker PSDKP Palopo, dan Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan.
f. **Satwas SDKP Takalar**, meliputi: Wilker PSDKP Bulukumba, Wilker PSDKP Jeneponto, Wilker PSDKP Selayar, dan Wilker PSDKP Sinjai.
g. **Satwas SDKP Mamuju**, meliputi: Wilker PSDKP Donggala, Wilker PSDKP Majene, Wilker PSDKP Mamuju Utara, dan Wilker PSDKP Polewali Mandar.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta isu strategis organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang rencana strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerjatahun 2023;
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2023; dan
4. Bab IV Penutup, menyajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2023 dan rekomendasi perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2019-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusunselaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020 – 2024.

Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen PSDKP

1. Visi

   "Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab"

2. Misi

   a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
   b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif.
   c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

3. Tujuan

   Sebagai penjabaran dari visi Direktorat Jenderal PSDKP sekaligus penterjemahan tujuan di dalam Renstra KKP 2020-2024 maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP akan sangat berkaitan dengan salah satu aspek pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu aspek kedaulatan (sovereignity) dengan fokus pada: "Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4. Sasaran

   Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan *balanced scorecard (BSC)* yang digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja.

5. Peta Strategi dan Sasaran Kegiatan

Peta strategi merupakan sejumlah sasaran kegiatan yang terangkai dalamhubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategimemberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki beberapa perspektif, yaitu suatu carapandang untuk mengelola kinerja organisasi. Perspektif yang digunakan dalam BSC KKPyaitu:

a. *Perspektif Stakeholder*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Yang dimaksud dengan stakeholder (pemangku kepentingan)adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi.

b. *Perspektif Customer*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *Customer*. *Customer* (pengguna layanan) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

c. *Perspektif Internal Process*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelolaorganisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (value chain).

d. *Perspektif Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang berupa kondisi sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankanproses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder.*

Sasaran Kegiatan merupakan deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Sasaran Kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan penjabaran visi dan misi Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024, yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target kinerja tahun 2023 yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2. RENCANA KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG TAHUN 2023

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun2023 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, dengan lingkup Kegiatan, meliputi:

1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
    a. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
    b. Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam
    c. Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
    d. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
    a. Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan
    b. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
    a. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
    b. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya.
    c. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
    d. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
    e. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya
    f. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yangmerusak
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pengawasan Perizinan berusaha berbasi risiko bidang perikanan
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
    a. Layanan BMN
    b. Layanan Hubungan Masyarakat
    c. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
    d. Layanan Umum
    e. Layanan Data dan Informasi
    f. Layanan Perkantoran
    g. Layanan Sarana Internal
    h. Layanan Manajemen SDM
    i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
    j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
    k. Layanan Manajemen Keuangan
    l. Layanan Reformasi Kinerja

2.3. PERJANJIAN KINERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pengelolaan kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP, juga ditujukan untuk menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi orginisasi; membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*); dan Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2023 sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMBINAAN POKMASWAS				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
KEGIATAN 2. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK2.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK2.1.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,6
		ISK2.1.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87,6
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	ISK3.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha kelautan	100
KEGIATAN 4. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK4.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha perikanan	100
KEGIATAN 5. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN				
SK5.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai	ISK5.1.1	Persentase penyelesaian pembangunan speedboat pengawas	100
		ISK5.1.2	Persentase penyelesaian pembangunan pos	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	ketetuan		pengawasan Satwas SDKP Makassar	
		ISK5.1.3	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP	100
KEGIATAN 6. PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK6.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	ISK6.1.1	Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	80
KEGIATAN 7. PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK7.1	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK7.1.1	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93
KEGIATAN 8. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK8.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	80
		ISK8.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	80
		ISK8.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung	75
		ISK8.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	100
		ISK8.1.5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	78
		ISK8.1.6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90
		ISK8.1.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75
		ISK8.1.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		ISK8.1.9	Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		ISK8.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	92
		ISK8.1.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	77,5
		ISK8.1.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	77,5
		ISK8.1.13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	89
		ISK8.1.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	82

2.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TW III TAHUN 2023

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

- Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
  Perhitungan data mentah perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
- Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
- Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).
- Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang dInput valid, reliable, dan obyektif.
- Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
- Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi Kinerjaku (https://kinerjaku.kkp.go.id/) yang merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pengelolaan kinerja.

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan III Tahun 2023 pada Sistem AplikasiPengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 110,95.

Gambar 3. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023

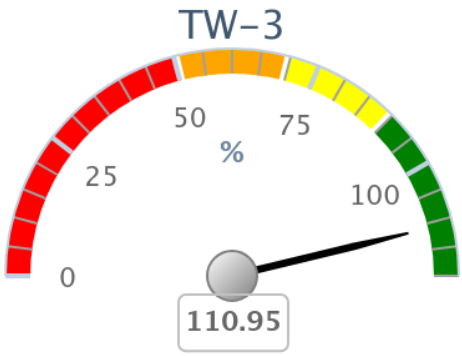

Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung pada triwulan III tahun 2023 sebesar 110,95% apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja triwulan III tahun 2022 yakni 111,63% maka terdapat penurunan sebesar 0,68%. kenaikan tersebut disebabkan karena adanya perubahan formulasi penghitungan capaian kinerja dalam manual iku serta adanya beberapa Indikator Kinerja yang capaiannya melebihi target pada triwulan III tahun 2023.

Pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Triwluan III Tahun 2023

Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2023	Target Septemeber	Capaian September	%
S.01		**Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif**						
	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas(indeks)	Indeks	Maximize	80	0		
S.02		**Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif**						**113,19**
	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	Indeks	Maximize	87,6	87,6	100	114.16
	3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	Indeks	Maximize	87,6	87,6	99,42	113,49
S.03		**Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan**						
	4	Persentase penyelesaian pembangunan speedboat pengawasan SDKP	%	Maximize	100	0		

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2023	Target Septemeber	Capaian September	%
5	Persentase penyelesaian pembangunan pos Pengawasan Satwas SDKP Makassar	%	Maximize	100	0		
6	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP	%	Maximize	100	0		
S.04	**Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan**						**100,00**
7	Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha kelautan	%	Maximize	100	100	100	100,00
S.05	**Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan**						**100,00**
8	Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha perikanan	%	Maximize	100	100	100	100,00
S.06	**Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas**						**120,00**
9	Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	%	Maximize	80	70	100	120,00
S.07	**Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas**						**120,00**
10	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	%	Maximize	93	70	60	120,00
S.08	**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP**						**112,06**
11	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks	Maximize	80	80	86,57	108,21
12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks	Maximize	80	80	98,15	120,00
13	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	75	0		
14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	100	100	100	100,00
15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks	Maximize	78	0		
16	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	90	0		
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	75	75	100	120,00

Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2023	Target Septemeber	Capaian September	%
	18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	NILAI	Maximize	21	0		
	19	Jumlah inovasi yang dihasilkan	Inovasi	Maximize	1	0		
	20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	92	92	100	108,70
	21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	77,5	0		
	22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	77,5	0		
	23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	89	0		
	24	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	82	0		

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan III tahun 2023, telah dilakukan pengukuran indikator kinerja terhadap 11 (Sebelas) indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, semua indikator kinerja dapat tercapai >= 100% dengan capaian biru (Istimewa) dan hijau (Baik).

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan di masing-masing Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukungtercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja triwulan III tahun 2023 dengan capaian TW III tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja triwulan III tahun 2023 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sasaran Kegiatan 1:

Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Kegiatan pembinaan Pokmaswas pada tahun 2023 memiliki target 7 (tujuh) kelompok mencakup seluruh Pokmaswas diseluruh wilayah kerja pangkalan PSDKP Bitung.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp525.000.000 dan realisasi TW III tahun 2023 Rp93.590.466 persentase realisasi anggaran sebesar 17,83%.

IKU1 INDEKS KUALITAS PEMBINAAN POKMASWAS

Pengukuran kinerja pada IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas, IKU ini akan tidak dilakukan pengukuran pada TW III tahun 2023 namun pengukuran dilakukan pada TW II dan TW IV tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 2:

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif terdiri 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1 Indeks kinerja operasi kapal pengawas; 2 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp12.725.889.000 dan realisasi TW III tahun 2023 Rp9.759.626.411 persentase realisasi anggaran sebesar 76,69%.

IKU2 INDEKS KINERJA OPERASI KAPAL PENGAWAS

Target kinerja IKU Indeks Kinerja Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW III tahun 2023 adalah 87,6 dan realisasinya tercapai 100 dengan persentase capaian kinerja 114,16%.

Target hari operasi pada tahun 2023 adalah 90 HO mengalami penambahan jumlah hari operasi dibanding tahun 2022 yaitu 53 HO. Faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah pada TW III tahun 2023 di telah dilakukan pelaksanaan operasi kapal pengawas KP. HIU 02 dan KP. Hiu 05 yang mana masing-masing kapal telah terealisasi 50 hari operasi dan seluruh komponen pembentuk dalam pencapaian indeks kinerja Kapal pengawas telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditentukan.

Tabel 3. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas TW III Tahun 2023

Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
	TW III			TW III			TW III	TW III			TW III			TW III			TW III	TW III			TW III			TW III			TW III		
	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai		
KP. HIU 02	92	135	70	0	0	30	40	0,32	0,59	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	100,00	100,0
KP. HIU 05	104	119	70	0	0	30	40	0,32	0,47	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	100,00	

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 10.631.129.000 dan realisasi TW III tahun 2023 adalah Rp8.271.668.011 realisasi anggaran sebesar 77,81%.

IKU3 INDEKS KINERJA SPEED BOAT PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Target IKU Indeks Kinerja Speedboat Pengawas pada tahun 2023 adalah 87,6 dan realisasi kinerja IKU Indeks Kinerja Speedboat Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW III 2023 tercapai 99,42 dengan persentase capaian kinerja 113,49%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target IKU ini TW III tahun 2023 adalah semua komponen yang menjadi target operasi dapat terealisasi sesuai dengan yang telah ditentukan. Dari ke enam belas unit speedboat yang dimiliki oleh Pangkalan PSDKP Bitung 14 unit speedboat telah melaksanakan giat operasi dan 2 diantaranya belum beroperasi, hal tersebut dikarenakan 1 umit speedboat masIh dalam proses pembangunan sedangkan 1 unit rubberboat dalam kondisi rusak berat dan sedang dalam proses perbaikan.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp2.094.760.000 dan realisasi TW III tahun 2023 adalah Rp1.148.383.150 persentase realisasi anggaran adalah 71,03%.

Tabel 4. Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW III Tahun 2023

Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)			Dukungan Operasi Bersama (20%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
	TW I			TW I			TW I 40%	TW I 40%			TW I			TW I			TW I 15%	TW I			TW I			TW I			TW I		
	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai		
ALBACORE 001	5	21	50%	0	0	50%	40	0,0000415	0,0000892	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	
NAPOLEON 030	5	7	50%	0	0	50%	40	0,0000415	0,0000519	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	
NAPOLEON 031	5	15	50%	0	0	50%	40	0,0000415	0,0000726	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	
NAPOLEON 056	5	12	50%	0	0	50%	40	0,0000415	0,0000560	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	
DOLPHIN 003	5	10	50%	0	0	50%	40	0,0000415	0,0000643	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	
DOLPHIN 019	5	22	50%	0	0	50%	40	0,0000415	0,0001327	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	
DOLPHIN 026	5	13	50%	0	0	50%	40	0,0000415	0,0000456	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	
SEARIDER 06	10	7	35%	0	0	50%	34	0,0000830	0,0001099	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	94,00	97,94
RB. SELAYAR	5	10	50%	0	0	50%	40	0,0000415	0,0000456	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	
RB. PANGKEP	10	25	50%	0	0	50%	40	0,0000830	0,0000767	37	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	97,00	
RB. PALOPO	5	9	50%	0	0	50%	40	0,0000415	0,0000415	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	
RB. TAKALAR (EKS. M	5	12	50%	0	0	50%	40	0,0000415	0,0000436	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	
RB. MOROWALI (EKS. KENDARI)	5	5	50%	0	0	50%	40	0,0000830	0,0000332	16	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	76,00	
RB. WAKATOBI	0	0	50%	0	0	50%	40	0,0000000	0,0000000	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	
RB. BANGGAI	15	15	50%	0	0	50%	40	0,0001244	0,0001556	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	
HIU BIRU	0	0	50%	0	0	50%	40	0,0000000	0,0000000	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5,00	100,00	

Sasaran Kegiatan 3:

Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan *prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan*

Sasaran Kegiatan Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu Persentase penyelesaian pembangunan speedboat pengawas, IKU Persentase penyelesaian pembangunan pos pengawasan Satwas SDKP Makassar dan IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp10.220.740.000 dan realisasi TW III tahun 2023 Rp2.830.067.892 persentase realisasi anggaran sebesar 27,69%.

IKU4 PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN SPEEDBOAT PENGAWAS

Belum dilakukan pengukuran kinerja pada IKU Indeks Persentase penyelesaian pembangunan speedboat pengawas, IKU ini akan dilakukan pengukurannya pada triwulan IV tahun 2023.

IKU5 PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN POS PENGAWASAN SATWAS SDKP MAKASSAR

Belum dilakukan pengukuran kinerja pada IKU Indeks Persentase penyelesaian pembangunan pos pengawasan Satwas SDKP Makassar, IKU ini akan dilakukan pengukurannya pada triwulan IV tahun 2023.

IKU6 PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP

Belum dilakukan pengukuran kinerja pada IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP, IKU ini akan dilakukan pengukurannya pada triwulan IV tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 4:

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan 4 terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan terdiri dari 1 (satu) Indikator Utama yaitu Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha kelautan.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp1.553.744.000 dan realisasi TW III tahun 2023 adalah Rp658.398.944 persentase realisasi anggaran adalah 42,37%.

IKU7 PERSENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAAN PELAKU USAHA KELAUTAN

Target IKU ini pada triwulan III tahun 2023 adalah 100% dengan capaian pada TW III 2023 adalah 100% sehingga untuk IKU ini dapat tercapai sesuai dengan target, faktor keberhasilan pencapaian IKU ini adalah seluruh kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan telah mempedomani kriteria dan kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan yang tercantum didalam Manual IKU.

Perhitungan realisasi persentase penyelesaian pemerikasaan kepatuhan pelaku usaha kelautan dapat dikatakan tercapai 100% jika dapat memenuhi tahapan pemeriksaan yakni dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan, adanya Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengawas perikanan/Polsus PWP3K dan pelaku usaha serta adanya laporan kegiatan pengawasan. Capaian ini merupakan hasil agregasi capaian 6 (enam) kegiatan pengawasan, meliputi:

- Pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi
- Pengawasan pengelolaan produk dan jasa kelautan
- Pengawasan pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan

- Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi
- Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Tabel 5. Rincian realisasi capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung s.d. TW III Tahun 2023

No	Kegiatan Pengawasan	CAPAIAN RIKSA	PERSENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN
1.	Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi	6	100
2.	Pengelolaan produk dan jasa kelautan	6	100
3.	Pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan ruang laut	42	100
4.	Pencemaran perikanandan non perikanan	7	100
5.	Pemanfaatan kawasan konservasi	6	100
6.	Kegiatan penangkapan ikan yang merusak	54	100
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung		**121**	**100**

Rincian informasi capaian kinerja untuk masing-masing Sub indikator kinerja di tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

Kegiatan pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung pada triwulan III tahun 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) pelaku usaha dengan capaian penyelesaian pemeriksaan tercapai 100%. Data pelaku usaha yang diawasi adalah sebagai berikut:

1) CV. Semangat Kawan Sejati Baru beralamat di Jl. Gatot Subroto V No.6, Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar memanfaatkan jenis ikan Hiu dan Pari Appendiks II
2) PT. Maa Ataita Indah beralamat di Jl. Boulevard, Perumahan Lili Blok F/14, Panakkukang Mas, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar memanfaatkan jenis ikan Napoleon
3) CV. Camar Laut beralamat di Jl. Raya Wadipalapa No.18, Kel. Dulomo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo memanfaatkan jenis ikan Hiu Lanjaman Appendiks II
4) Muh. Ibnu Fajar Ishak beralamat di Jl. Lumba-Lumba, Kel. Ipilo, Kota Timur, Kota Gorontalo memanfaatkan jenis ikan Hiu dan Pari Appendiks II
5) PT. Rohtadi beralamat di Jl. Tikala Kumaraka Lingk. III No.23, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kec. Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara memanfaatkan jenis ikan Hiu dan Pari Appendiks II
6) CV. Fishkal Berkah Ilahi berlamat di Jl. Galangan Kapal, Kaluku Badoa, Kec. Tallo, Kota Makassar memanfaatkan jenis ikan Napoleon

2. Pengelolaan produk dan jasa kelautan

Kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung pada triwulan

III tahun 2023 pengawasan terhadap pelaku usaha wisata bahari. telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) pelaku usaha produk dan jasa kelautan dengan capaian penyelesaian pemeriksaan tercapai 100%. Data pelaku usaha yang diawasi adalah sebagai berikut:

1) PT. Duta Citra Wisata atau Bastianos Diver Resort Bunaken beralamat di Pulau Bunaken, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.
2) PT. Pandu Harapan Nusa atau Grand Luley Hotel beralamat di Jl. Raya Tongkaina, Desa Tongkaina, Kec. Bunaken, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.
3) PT. Sembilan Big Fish beralamat di Kel. Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.
4) PT. Coral Eye Bangka beralamat di Desa Lihunu, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara.
5) PT. Blue Bay Divers beralamat si Kel. Lihunu, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara.
6) PT. Siladen Island Resort and Spa beralamat di Pulau Siladen, Kel. Bunaken, Kec. Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.

3. Pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut

Pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya triwulan III tahun 2023 sebanyak 42 (empat puluh dua) pelaku usaha dengan persentase capaian penyelesaian pemeriksaan 100%. Data pelaku usaha yang diawasi adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Wilayah Pesisir
    1) PT. TJ Silfanus beralamat di Kel. Malalayang I, Kec. Malalayang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.
    2) PT. Gema Kreasi Perdana beralamat di Desa Sukarela Jaya, Kec. WawonI Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara.
    3) PT. Ramadhan Moramo Raya beralamat di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara.
    4) PT. Citra Khusuma Sultra beralamat di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
    5) PT. Hoffmen Energi Perkasa beralamat di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
    6) PT. Arsa Mega Pratama beralamat di Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
b. Pemanfaatan Wilayah Pulau Pulau Kecil
    1) PT. Tiran Indonesia beralamat di Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
    2) PT. Arsa Mega Pratama beralamat di Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara,

Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara

3) PT. Ramadhan Moramo Raya beralamat di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
4) PT. Citra Khusuma Sultra beralamat di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
5) PT. Hoffmen Energi Perkasa berlokasi di Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
6) PT. Arsa Mega Pratama berlokasi di Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara

c. Pemanfaatan Ruang Laut

1) PT. Arsa Mega Pratama lokasi di Perairan Teluk Matarape, Desa Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara
2) PT. Kelompok Delapan Indonesia lokasi di Desa Matarape, Kec. Menui Kepulauan, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah
3) PT. Nusajaya Persadatama Mandiri lokasi di Desa Matarape, Kec. Menui Kepulauan, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah
4) PT. Kacci Purnama Indah lokasi di Perairan Teluk Matarape, Desa Langgikima, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara
5) PT. Indra Bakti Mustika lokasi di Perairan Teluk Matarape, Desa Lameruru, Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara
6) PT. Multi Nabati Sulawesi lokasi di Kel. Paceda, Kec. Madidir, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara
7) PT. Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) lokasi di Desa Topogaro, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah
8) PT. Bola Dunia Mandiri lokasi di Desa Oko-Oko, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara
9) PT. Gasing Sulawesi lokasi di Desa Oko-Oko, Kec. Pomala, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara
10) PT. Pertambangan Nickel Sulawesi Tenggara lokasi di Desa Lalonggolosua, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara
11) PT. Akar Mas Indonesia lokasi di Desa Hakatutobo, Kec. Pomala, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara
12) PT. Wijaya Nikel Nusantara lokasi di Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara
13) PT. Aneka Tambang Tbk lokasi di Kec. Pomala, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara
14) PT. Waja Inti Lestari lokasi di Desa Babarina, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara
15) PT. Thosida Indonesia lokasi di Tanjung Leppe, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi

Tenggara

16) PT. Dharma Rosadi Internasional lokasi di Tanjung Leppe, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara
17) PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)/ PT. Bintangdelapan Mineral lokasi di Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah dan Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah
18) PT. Nutrindo Freshfood Internasional lokasi di Kel. Tanjung Merah, Kec. Matuari, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara
19) PT. Mitra Jaya Samudera lokasi di Kel. Tanjung Merah, Kec. Matuari, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara
20) PT. Tumpaan Makuri Mandiri lokasi di Desa Paslaten Satu, Kec. Tatapaan, Kab. Minahasa Selatan
21) PT. Pillar Persada Parigi lokasi di Desa Bajo, Kec. Tatapaan, Kab. Minahasa Selatan
22) PT. Boddia Galesong Jaya lokasi di Kel. Topejawa, Kec. Mangarabombang, Kota Takalar, Prov. Sulawesi Selatan
23) CV. Wisata Pantai Bahari lokasi di Kel. Sampungan, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan
24) PT. Rezky Utama Jaya lokasi di Desa Nambo, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah
25) PT. Sulawesi Resouces lokasi di Desa Bahomoahi, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah
26) PT. Oti Eya Abadi lokasi di Desa Kolono, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah
27) PT. Wanxiang Nickel Indonesia lokasi di Desa Bahomotefe, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah
28) CV. Selaras Maju lokasi di Desa Siambatu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah
29) PT. Yasmin Bumi Asri lokasi di Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
30) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) lokasi di Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan

4. Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan

Kegiatan pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung pada triwulan III tahun 2023 pengawasan terhadap 7 (tujuh) pelaku usaha dengan capaian penyelesaian pemeriksaan tercapai 100%. Data pelaku usaha yang diawasi adalah sebagai berikut:

1) PT. Shin Sheng Fa Ocean beralamat di Lk. III, Kel. Paceda, Kec. Madidir, Kota Bitung jenis usaha Unit Pengolahan Ikan

2) PT. Sari Usaha Mandiri beralamat di Jl. Efraim Lengkong No.17, Kel. Manembo-Nembo Bawah, Kec. Matuari, Kota Bitung jenis usaha Unit Pengolahan Ikan
3) PT. Sinar Pure Foods Internasional beralamat di Jl. Raya Madidir, Kel. Paceda, Kec. Maesa, Kota Bitung jenis usaha Unit Pengolahan Ikan
4) PT. Keumkang Industri Indonesia beralamat di Jl. Kima 15, Kav. R4D - R4E, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar jenis usaha Unit Pengolahan Ikan
5) PT. Jireh Commodity beralamat di Jl. Kima Raya 2, Kompleks, Kima Square Warehouse 2 Unit No.11,12,13, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar jenis usaha Unit Pengolahan Ikan
6) PT. Mina Maju Sejahtera beralamat di Jl. Cinranae No.1, Kab. Maros jenis usaha Unit Pengolahan Ikan
7) PT. Parlevliet Paraba Seafood beralamat di Jl. Jembatan Lama, Poros Lama, Maros, No.89, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros jenis usaha Unit Pengolahan Ikan

5. Pemanfaatan kawasan konservasi

Kegiatan pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi berlokasi di TWP Kapoposang telah dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung pada triwulan III tahun 2023 terhadap 6 (enam) pelaku usaha dengan capaian penyelesaian pemeriksaan tercapai 100%. Data pelaku usaha yang diawasi adalah sebagai berikut:

1) Amirullah (KM. Doa Ibu) jenis usaha Kapal Pengangkut Ikan pemanfaatan pada Zona pemanfaatan
2) Mudassir (KM. Wati Jaya) jenis usaha Kapal Pengangkut Ikan pemanfaatan pada Zona pemanfaatan
3) PT Kapoposang Utama Jaya (Kapoposang Paradise Resort) jenis usaha Penyediaan infrastruktur pariwisata alam pemanfaatan pada Zona pemanfaatan
4) Halido (KM. Bajiminasa) jenis usaha pemanfaatan pada Zona pemanfaatan
5) Sanuddin (KM. Muhammad Danial) jenis usaha Kapal Pengangkut Ikan pemanfaatan pada Zona pemanfaatan
6) H. Mustari (KM. Rahmi Indah) jenis usaha Kapal Pengangkut Ikan pemanfaatan pada Zona pemanfaatan

6. Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan muatan kapal yang terindikasi terjadinya kegiatan *destructive fishing* serta sebagai upaya tindaklanjut aduan masyarakat terkait adanya aktifitas kegiatan penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bom dan bius ikan. Pada triwulan III tahun 2023 Pangkalan PSDKP Bitung telah melakukan pemeriksaan terhadap 54 (lima puluh empat) pelaku usaha, dengan persentase penyelesaian pemeriksaan 100%.

Sasaran Kegiatan 5:

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Target Sasaran Kegiatan 5 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan di dukung dengan IKU 8 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, target capaian IKU pada triwulan III tahun 2023 adalah 100% dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan dengan capaian tahun 2022 capaian nya tetap tidak mengalami kenaikan maupun penurunan capaian.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp1.802.000.000 dan realisasi TW III tahun 2023 adalah Rp553.724.698 persentase realisasi anggaran adalah 30,73%.

IKU8 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada triwulan III tahun 2023 adalah 100% dari target 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan dengan capaian triwulan III tahun 2022 capaiannya tetap tidak mengalami kenaikan maupun penurunan capaian.

Perhitungan capaian persentase penyelesaian pemerikasaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat dikatakan tercapai 100% jika dapat memenuhi tahapan pemeriksaan yakni dilengkapi dengan surat pemberitahuan ke pelaku usaha, surat tugas dari pimpinan, adanya Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha serta adanya laporan kegiatan pengawasan yang dInput ke sistem pelaporan Direktorat PPSDP. Dalam proses pelaksanaan kegiatannya mengacu pada Perdirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko bidang perikanan terdapat dua mekanisme pengawasan yaitu pengawasan berbasis OSS dan pengawasan insidental.

Pengawasan yang telah dilaksanakan pada triwulan III tahun 2023 di Pangkalan PSDKP Bitung berdasarkan kode proyek sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) kode proyek, sebagai berikut:

Tabel 6. Rekapitulasi pemeriksaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung s.d. Triwulan III Tahun 2023

No	Subsektor yang Diperiksa	Jumlah yang Diperiksa		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan
		Rutin	Insidental	
1	Penangkapan ikan	2	33	100
2	Pengangkutan ikan	0	4	100
3	Pembudidayaan ikan	1	17	100

No	Subsektor yang Diperiksa	Jumlah yang Diperiksa		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan
		Rutin	Insidental	
4	Pengolahan ikan	25	35	100
5	Pemasaran ikan	7	19	100
TOTAL		**35**	**108**	**100**

Sasaran Kegiatan 6:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Tuntas

Sasaran Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan, target IKU ini adalah 80%.

IKU9 PERSENTASE PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Target IKU pada tahun 2023 adalah 5 perkara, sampai dengan Triwulan I tahun 2023 Pangkalan PSDKP Bitung telah selesai mengenakan sanksi administrasi terhadap 13 pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, baik bidang kelautan maupun perikanan. Sehingga secara kuantitas capaian penyelesaian telah melebihi dari 120%. Sampai dengan Triwulan I tahun 2023 Pangkalan PSDKP Bitung telah mengenakan sanksi administrasi terhadap 16 pelaku usaha baik bidang kelautan maupun perikanan, dengan rincian 9 pelaku usaha dikenakan denda administrasi, 4 pelaku usaha dikenakan surat peringatan I, dan 3 pelaku usaha dikenakan paksaan pemerintah.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000 dan realisasi TW I tahun 2023 adalah Rp. 36.160.721dengan realisasi serapan anggaran 36,16%.

Sasaran Kegiatan 7 :

Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaraan Kegiatan 7 Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas di dukung dengan satu indikator kinerja, yaitu: 1. IKU Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Pada tahun 2023 di Pangkalan PSDKP Bitung terdapat 3 (tiga) target penyelesaian penyidikan bidang kelautan dan perikanan.

IKU10 PERSENTASE PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Target IKU pada tahun 2023 adalah 3 perkara, sampai dengan Triwulan I tahun 2023 Pangkalan PSDKP Bitung telah menangani 5 perkara bidang kelautan dan perikanan. Tiga perkara telah selesai sampai dengan tahap I dan dua perkara baru sampai dengan tahap I.

target IKU ini pada triwulan I adalah 40% sedangkan capaiannya adalah 60%. Sehingga persentase realisasi IKU ini adalah 120%. Kelima perkara yang ditangani merupakan tindak pidana perikanan yaitu penggunaan bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 356.200.000 dan realisasi TW I tahun 2023 adalah Rp. 38.310.721 dengan realisasi serapan anggaran 10,76%. Realisasi anggaran masih dalam proses pengajuan, sehingga adanya perbedaan capaian output dengan realisasi anggaran pada kegiatan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Sasaran Kegiatan 8:

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP

Sasaran Kegiatan 8 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP di dukung dengan 14 (empat belas) indikator kinerja.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp20.913.957.000 dan TW III tahun 2023 adalah Rp14.138.052.545 persentase realisasi anggaran sebesar 67,60%.

IKU11 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SLO SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Indeks Kepuasan Masyarakat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik pengawas perikanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan setiap triwulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Triwulan III tahun 2023 capaian indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO adalah 86,57 dari target 80 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja IKM pengguna layanan SLO pada TW III tahun 2023 adalah 108,21%. Jika dibandingkan dengan capaian IKM pada Triwulan III tahun 2022 nilai capaiannya 90,55 dan persentase capaiannya 113,19%, mengalami penurunan senilai 4,98 poin, hal tersebut disebabkan penggunaan form penilaian SKM tahun 2023 melalui aplikasi SiSusan sehingga pengguna layanan belum familiar dengan aplikasi tersebut. Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah Pangkalan PSDKP Bitung gencar melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha terkait peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, serta berupaya memberikan pelayanan prima terhadap pengguna jasa dan adanya upaya perbaikan terhadap fasilitas pelayanan publik yang memadai dalam hal ini pemindahan ruang pelayanan dari komplek PPS Bitung ke kantor utama Pangkalan PSDKP Bitung.

Tabel 7. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO TW III tahun 2023

No.	Unsur Pelayanan	NRR Per Unsur	NRR tertimbang per Unsur	IKM per Unsur
1	Persyaratan	3,604	0,40	90,10
2	Prosedur	3,521	0,39	86,46
3	Waktu Pelayanan	3,583	0,40	89,58
4	Biaya/Tarif	3,500	0,39	87,50
5	Produk Layanan	3,500	0,39	87,50
6	Kompetensi Pelaksana	3,365	0,37	84,90
7	Perilaku Pelaksana	3,333	0,37	83,33
8	Sarana dan Prasarana	3,396	0,38	84,90
9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,396	0,38	84,90
	NILAI INDEKS (NI)		**3,46**	
	NILAI IKM setelah Dikonversi (NI x 25)		**86,57**	

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 (sembilan) unsur pelayanan hasil survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung dengan jumlah responden sebanyak 48 responden, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat SKM : 3,46 dengan nilai Indeks sebesar 86,57 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT MEMUASKAN, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00.

IKU12 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN LVHPI LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENANGKAPAN IKAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI TW I tahun 2023 adalah 98,05 dari target 80, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunan layanan LVHPI adalah 120%. Jika dibandingkan dengan nilai IKM pada TW III tahun 2022 yaitu 90,94 menunjukan adanya peningkatan 7,11 poin. hal tersebut menunjukan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas dalam pelayanan yang diberikan terhadap pengguna jasa layanan LVHPI. Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah Pangkalan PSDKP Bitung gencar melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha terkait peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, serta berupaya memberikan pelayanan prima terhadap pengguna jasa dan adanya upaya perbaikan terhadap fasilitas pelayanan publik yang memadai dalam hal ini pemindahan ruang pelayanan dari komplek PPS Bitung ke kantor utama Pangkalan PSDKP Bitung.

Tabel 8. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI TW I tahun 2023

No.	Unsur Pelayanan	NRR Per Unsur	NRR tertimbang per Unsur	IKM per Unsur
1	Persyaratan	4,000	0,44	100,00
2	Prosedur	3,667	0,41	91,67
3	Waktu Pelayanan	3,667	0,41	91,67
4	Biaya/Tarif	4,000	0,44	100,00
5	Produk Layanan	4,000	0,44	100,00
6	Kompetensi Pelaksana	4,000	0,44	100,00
7	Perilaku Pelaksana	4,000	0,44	100,00
8	Sarana dan Prasarana	4,000	0,44	100,00
9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	4,000	0,44	100,00
	NILAI INDEKS (NI)		3.92	
	NILAI IKM setelah Dikonversi (NI x 25)		**98.05**	

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 (sembilan) unsur pelayanan hasil survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan LVHPI di Pangkalan PSDKP Bitung dengan jumlah responden sebanyak 3 responden, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat SKM : 3,92 dengan nilai Indeks sebesar 98,05 dengan mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT MEMUASKAN, karena berada dalam interval nilai konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00.

IKU13 NILAI WBK LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan III tahun 2023 belum dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU14 PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN BERBASIS MANAJEMEN RISIKO LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Target IKU ini pada TW III tahun 2023 adalah 100% dan capaiannya adalah 100%. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Pangkalan PSDKP Bitung dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan oleh sekretariat Ditjen PSDKP. Dari 9 rencana pengendalian risiko terealisasi 9 sehingga capainnya 100%.

IKU15 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan III tahun 2023 belum dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU16 NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan III tahun 2023 belum dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU17 PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Target IKU pada Triwulan III tahun 2023 adalah 75%, dan capaian pada TW I tahun

2023 adalah 100% dengan persentase capaian 120%. IKU ini pada TW III terdapat 4 (empat) rekomendasi yang telah ditindak lanjuti oleh Pangkalan PSDKP Bitung, sehingga capaiannya tercapai 100%.

IKU18 NILAI IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA KERJA

Pada Triwulan III tahun 2023 belum dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU19 JUMLAH INOVASI YANG DIHASILKAN

Pada Triwulan III tahun 2023 belum dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU20 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Hasil capaian IKU ini pada TW III tahun 2023 adalah 100% dari target 2023 di Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 92% persentase capaian IKU ini adalah 108,70%.

IKU21 TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan III tahun 2023 belum dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU22 TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan III tahun 2023 belum dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU23 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN IKPA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan III tahun 2023 belum dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU24 NILAI KINERJA ANGGARAN NKA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan III tahun 2023 belum dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

3.3. AKUNTABILITAS ANGGARAN

PAGU anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2023 adalah Rp**48.147.530.000** realisasi anggaran TW III tahun 2023 adalah Rp28.350.377.020 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 58,88%.

BAB 4
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP sebagai pemberi amanah dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung sebagai penerima amanah sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 8 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2023 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan kinerjaku.kkp.go.id adalah 110,95. Semua indikator kinerja dapat tercapai sesuai target.

4.2. REKOMENDASI

Dalam rangka perbaikan pencapaian indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2023, perlu dilakukan peningkatan terhadap capaian kinerja yang capaiannya belum maksimal, guna mencapai target pelaksanaan kegiatan berdasarkan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja maupun target output dalam RKA/KL.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kurniawan**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung
Adin Nurawaluddin	**Kurniawan**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMBINAAN POKMASWAS				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
KEGIATAN 2. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK2.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK2.1.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,6
		ISK2.1.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87,6
KEGIATAN 3. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan	ISK3.1.1	Persentase penyelesaian pembangunan speedboat pengawas	100
		ISK3.1.2	Persentase penyelesaian pembangunan pos pengawasan Satwas SDKP Makassar	100
		ISK3.1.3	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP	100
KEGIATAN 4. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK4.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	ISK4.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha kelautan	100
KEGIATAN 5. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK5.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK5.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha perikanan	100
KEGIATAN 6. PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK6.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	ISK6.1.1	Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	80
KEGIATAN 7. PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK7.1	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK7.1.1	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 8. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK8.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	80
		ISK8.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	80
		ISK8.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung	75
		ISK8.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	100
		ISK8.1.5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	78
		ISK8.1.6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90
		ISK8.1.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75
		ISK8.1.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		ISK8.1.9	Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
		ISK8.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	92
		ISK8.1.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	77,5
		ISK8.1.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	77,5
		ISK8.1.13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	89
		ISK8.1.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	82

Data Anggaran Tahun 2023

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	**Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan**	**1.553.744.000**
SK1.1	*Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan*	
Kegiatan 2	**Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan**	**1.802.000.000**
SK2.1	*Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan*	
Kegiatan 3	**Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan**	**23.495.629.000**
SK3.1	*Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif*	
SK3.2	*Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif*	
SK3.3	*Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan*	
Kegiatan 4	**Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan**	**406.200.000**
SK4.1	*Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif*	
Kegiatan 5	**Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**20.913.957.000**
SK5.1	*Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP*	
Total Anggaran		**48.147.530.000**

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Bitung

Kurniawan